

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMKOT BATU SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Wulan Dri Puspita^{1*}, Dyah Ani Pangastuti²

D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang¹

S1 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang²

*¹wulan.pupita@unmer.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the financial performance of the Local Government of Batu before and during the Covid-19 pandemic. This research used ratios such as growth ratios, independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, spending compatibility ratios, and economy ratios to analyze their financial statement. The research used a descriptive quantitative method by using secondary data of financial statements for 2019 and 2020 in the Local Government of Batu. The study stated that the Local Government Batu's revenue performance was decreased in 2020 compared to 2019, even though there was a providence in their spending in 2019. The dominancy of Indonesia's Central Government was still visible in their transfer revenue for their financial statement in 2019 and 2020. The financial revenue level increased in 2020 at an effectiveness level compared with the previous year. Their financial's revenue was at an efficient level in 2019 and 2020. They spent most of their financial budget on operating expenses, but in 2020 there was a rapid increase in unexpected expenditure. In addition, operating costs, capital expenditures, and unexpected expenditures were at an economic level for 2019 and 2020.

Keywords: *Financial performance, kota batu, covid-19 pandemic*

ABSTRAK

Penelitian mengenai kinerja keuangan pada pemerintah kota Batu bertujuan untuk menganalisis kinerja sebelum dan saat pandemi Covid-19 menggunakan rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio ekonomi. Metode kuantitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kota Batu pada tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat penurunan pendapatan di tahun 2020 dibanding 2019, tetapi terdapat penghematan atas belanja yang dilakukan di tahun 2020. Dominasi peran pemerintah pusat secara finansial masih terlihat baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Tingkat efektivitas di tahun 2020 dapat dikatakan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan pendapatan, tetapi tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan efisien. Belanja di tahun 2019 dan 2020 masih banyak digunakan untuk belanja operasi, walaupun terjadi kenaikan yang cukup pesat pada belanja tak terduga. Selain itu, belanja operasi, belanja modal dan belanja terduga masih dapat dikatakan ekonomis untuk tahun 2019 dan 2020.

Kata kunci: *Kinerja keuangan, kota batu, pandemi covid-19*

1. PENDAHULUAN

Indonesia dihadapkan dengan musibah pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Upaya penanganan diambil oleh pemerintah pusat (Pempus) dibantu pemerintah daerah (Pemda) dengan membuat berbagai kebijakan, termasuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas masyarakat untuk berpergian keluar rumah. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya di sektor kesehatan, sektor ekonomi juga terkena imbas akibat penurunan pendapatan beberapa bisnis seperti hotel, rumah makan, dan pariwisata. Pempus dibantu oleh Pemda akhirnya harus melakukan upaya dalam mengatasi pandemi tersebut, salah satunya dengan menyesuaikan anggaran yang ada untuk kegiatan penuntasan pandemi.

Pemda berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki hak otonomi daerah. Hak tersebut memberikan mereka wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Pemda berhak mengatur penggunaan penerimaan yang berasal dari pungutan dan pendayagunaan pajak dan retribusi, bagi hasil sumber daya daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Penerimaan dan penggunaan tersebut digunakan oleh pemda untuk membiayai keperluan pemerintahannya yang dicantumkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemda yang disetujui baik oleh pemimpin daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dalam bentuk kebijakan milik daerah. APBD merupakan bentuk rencana keuangan yang nantinya digunakan untuk mengelola sumber daya daerah. Hasil pengelolaan keuangan tersebut harus mencerminkan pemerintahan yang bersih karena dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel dan disusun dalam bentuk laporan keuangan (Pujanira & Taman, 2017). Laporan keuangan tersebut harus disusun menggunakan standart akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 dengan menggunakan basis akrual. Panggabean (2019) menyatakan Laporan keuangan dapat dikatakan akurat apabila didukung dengan hasil opini audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan keuangan juga dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus kebutuhan keuangannya. Keberhasilan pemda mengelola keuangannya dapat dilihat melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan mencerminkan akuntabilitas bagi pemda dalam memberikan pelayanan publik. Penganalisisas kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis.

Penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Zulkarnain (2020), Syafnita (2021), serta Pandelaki, Engka dan Rorong (2021). Zulkarnain (2020) mengungkapkan bahwa target pendapatan asli daerah (PAD) mayoritas Pemda di Jawa Barat telah memenuhi syarat efektif bahkan beberapa memiliki predikat sangat efektif. Selain itu, Pemda tersebut telah berhasil memaksimalkan belanja modalnya.

Syafnita (2021) menyatakan bahwa target anggaran untuk semua pemkot yang ada di Jawa Tengah sudah sangat efektif walaupun untuk aktivitasnya masih dapat dikatakan tidak baik. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Pandelaki, Engka dan Rorong (2021) menyatakan bahwa target pemungutan pajak dan retribusi pada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009-2019 dikategorikan sangat efektif, sementara

pemungutan pajak dan retribusi dapat dikatakan beragam di kategori cukup efisien, efisien dan sangat efisien. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa, adanya otonomi daerah memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengelola keuangan mereka. Selain itu setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk mengelola keuangan yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian serupa mengenai analisis kinerja keuangan masih relevan untuk dilakukan terutamanya dengan adanya fenomena pandemi Covid-19.

Kota Batu merupakan kota wisata yang terkena dampak dari Covid-19. Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Batu (Pemkot Batu) mayoritas berasal dari industri wisata seperti hotel, rumah makan, tempat hiburan, dll. Pemkot Batu menerbitkan Peraturan WaliKota Batu (Perwali) No. 48 tahun 2020 untuk mengatur PSSB sebagai upaya penanggulangan pandemi. Banyak masyarakat harus mengurangi kegiatan mereka di luar rumah dengan bekerja dari rumah akibat adanya PSBB.

Hotel, rumah makan, dan tempat hiburan terpaksa harus dibatasi hingga ditutup sementara untuk mengurangi jumlah kerumunan masyarakat. Sanksi berupa teguran sampa pencabutan izin usaha juga diberikan apabila melanggar ketentuan PSBB. Pembatasan tersebut tidak hanya mempengaruhi pemasukan usaha-usaha yang berada di Kota Batu, tetapi juga dapat mempengaruhi penurunan pendapatan yang diperoleh oleh Pemkot Batu karena mereka masih mengandalkan penerimaan pajak dan retribusi dari usaha tersebut.

Pemkot Batu tetap berupaya mengatasi dampak Covid-19 melalui kebijakan yang mereka terapkan dengan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan dana yang berasal dari APBD. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Penilaian kinerja keuangan Pemkot Batu juga perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan mereka dalam mengelola keuangannya terutama akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penjelasan tersebut menjadi motivasi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai “Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”.

2. LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang dipandang kompleks dan heterogen. Tanggung jawab pemerintah menurut Mahsun (2018) adalah memenuhi kebutuhan rakyat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan sosial dengan menjalankan kegiatan pemerintahannya secara efektif dan efisien.

Kebutuhan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian manajemen sektor publik memiliki berbagai macam variasi termasuk di bagian keuangan. Informasi keuangan tersebut nantinya digunakan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal (Mardiasmo, 2018). Pihak internal organisasi akan menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga seorang akuntan akan berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan secara relevan dan andal sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah (PSAP) No. 1 tahun 2019 menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan memenuhi kebutuhan pengguna yang membutuhkan. Oleh karena laporan keuangan pemerintah haruslah menyajikan informasi mengenai penyerapan anggaran, selisih penggunaan anggaran, posisi keuangan, cerminan kegiatan operasional, perubahan ekuitas, dan arus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan bentuk anggaran kegiatan pemda yang mencakup rencana pengeluaran biaya dan rencana pendapatan yang diperoleh selama satu periode. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kebijakan fiskal. Oleh karena itu, anggaran memegang prioritas pemda dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban anggaran oleh pemda dituangkan dalam bentuk LRA. LRA menurut PSAP No. 1 tahun 2019 berisi tentang sumber, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam bentuk penggunaan anggaran.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja menurut Mahsun (2018) merupakan tingkat pencapaian *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui apabila organisasi tersebut memiliki kriteria keberhasilan untuk mencapai target-targetnya yang dinilai sebagai pengukuran kinerja. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja, mengalokasikan sumber daya, perwujudan tanggungjawab publik, serta bentuk komunikasi kelembagaan. Metode pengukurannya dapat menggunakan *value for money* yaitu mencakup pertanggungjawaban penggunaan uang. Indikatornya dibagi menjadi dua yaitu biaya (ekonomi dan efisien) dan kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo, 2018).

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi memberikan informasi tentang keuangan kepada pihak berkepentingan yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Kawatu, 2019). Informasi keuangan dapat digunakan apabila bersifat relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Sifat LKPD adalah *general purposive* yang artinya umum dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya. Faktanya para pemangku kepentingan tidak semuanya dapat memahami laporan tersebut karena mereka memiliki latar belakang yang bervariasi. Oleh karena itu, untuk membantu para pemangku kepentingan dalam menggunakan informasi LKPD diperlukan bantuan akuntan analis.

Analisis LKPD menurut Kawatu (2019) dapat membantu memahami laporan dengan menafsirkan angka-angka untuk kemudian dilakukan evaluasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Beberapa jenis analisis keuangan sektor publik antara lain:

- 1) Analisis Pertumbuhan
 - a. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kinerja pendapatan selama beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2019). Tren pendapatan dapat

dikatakan baik apabila dapat dapat naik terus setiap periodenya, jika mengalami penurunan maka penyebabnya harus ditemukan dan dicari solusinya. Berikut rumus rasio pertumbuhan pendapatan:

$$\text{Pertumbuhan pendapatan th } t = \frac{\text{Pendapatan th } t - \text{Pendapatan th } (t - 1)}{\text{Pendapatan th } (t - 1)} \times 100\%$$

Sumber. Mahmudi (2019)

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja menurut Mahmudi (2019) dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja. Belanja tersebut harus dapat dikatakan rasional apabila pertanggungjawabannya telah dilakukan. Mahmudi (2019) menambahkan bahwa belanja cenderung akan selalu naik karena disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi, perubahan kurs, pelayanan, dan faktor ekonomi. Berikut rumus rasio pertumbuhan belanja:

$$\text{Pertumbuhan belanja th } t = \frac{\text{Belanja th } t - \text{Belanja th } (t - 1)}{\text{Belanja th } (t - 1)} \times 100\%$$

Sumber. Mahmudi (2019)

2) Analisis Kemandirian

Analisis kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai daerahnya melalui PAD (Kawatu, 2019). Penghitungan rasio kemandirian menurut Kawatu (2019) dilakukan dengan membandingkan PAD dengan total antara transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dari pemda lainnya. PAD yang semakin besar dibandingkan total transfer akan mencerminkan kemandirian daerah tersebut, yang artinya daerah tersebut mampu membiaya otonomi daerahnya. Berikut rumus rasio kontribusi:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Daerah} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber. Kawatu (2019)

3) Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan penerimaan suatu organisasi sektor publik berdasarkan anggarannya (Mahsun, 2018; Kawatu, 2019). Analisis tersebut tidak mengukur besar pengeluaran untuk mencapai tujuan, tetapi melihat perolehan tujuan yang ditetapkan. Berikut rumus untuk mengukur rasio efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber. Mahmudi (2019)

Tabel 1 : Kategori Nilai Efektivitas

Kategori	Nilai
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber. Mahmudi (2019)

4) Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi menurut Mahsun (2018) membandingkan antara keluaran dengan masukan. Pengukuran rasio tersebut memerlukan data realisasi PAD dan realisasi belanja. Semakin kecil tingkat efisiensinya semakin baik kondisi kinerja keuangan pemda tersebut, begitu pula sebaliknya. Penghitungan rasio efisiensi menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber. Mahsun (2018)

Tabel 2 : Kategori Nilai Efisiensi

Kategori	Nilai
Efisien	< 100%
Efisien Berimbang	= 100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber. Mahsun (2018)

5) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja menurut Mahmudi (2019) digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat distribusi sumber daya, alokasi sumber daya, dan stabilisasi politik. Oleh karena itu pemda perlu untuk mengharmonisasikan penggunaan belanja. Berikut rumus untuk mengukur rasio tersebut:

$$\text{Rasio keserasian belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber. Mahmudi (2019)

6) Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi digunakan untuk mengukur pengeluaran belanja dengan anggaran belanjanya yang dilakukan oleh pemda dalam menggunakan sumber daya keuangan, terutama jika realisasi biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada anggarannya (Mahsun, 2018; Mahmudi, 2019). Rumus untuk menghitung rasio ekonomis adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Sumber. Mahsun (2018)

Tabel 3 : Kategori Nilai Ekonomi

Kategori	Nilai
Ekonomis	< 100%
Ekonomi berimbang	= 100%
Tidak Ekonomis	> 100%

Sumber. Mahsun (2018)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis laporan keuangan terutama laporan realisasi anggaran milik Pemkot Batu menggunakan rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis. Pemkot Batu dipilih sebagai objek penelitian karena telah berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun 2019 dan 2020, sehingga laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dari salah saji yang material. Tempat penelitian adalah Badan Keuangan Daerah, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 507 Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kota Batu.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari dokumen LRA. Dokumen diminta melalui Bendahara Umum Daerah, berupa LRA pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan data penelitian berupa LRA milik Pemkot Batu tahun 2019 hingga 2020.
- 2) Menghitung rasio keuangan berdasarkan LRA tersebut. Rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis.
- 3) Menganalisa kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan tersebut.
- 4) Menarik kesimpulan berdasarkan indikator penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini merupakan penilaian mengenai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan di Pemkot Batu untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 yaitu sebelum Covid-19 diidentifikasi dan saat tahun awal Covid-19 teridentifikasi di Indonesia. Rasio penghitungan yang digunakan adalah rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis. Rasio-rasio tersebut dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemkot Batu. Adapun hasil dari analisis rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut.

Analisis Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menunjukkan tren positif maupun negatif. Tren rasio pertumbuhan pendapatan diharapkan tumbuh positif sebagai bentuk adanya peningkatan penerimaan pendapatan. Sementara untuk tren rasio pertumbuhan belanja, walaupun ada indikasi terjadi kenaikan tetapi diharapkan belanja tersebut dapat dikontrol pertumbuhannya.

Tabel 4 : Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020	Persentase
Pendapatan Asli Daerah	Rp 183.717.261.619,50	Rp 126.770.487.721,96	-31,00%
Pendapatan Transfer	Rp 786.961.111.369,00	Rp 732.316.780.356,00	-6,94%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 18.705.880.000,00	Rp 23.955.685.000,00	28,06%
Total Pendapatan Daerah	Rp 989.384.252.988,50	Rp 883.042.953.077,96	-10,75%

Sumber. Data diolah (2021)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada penerimaan total pendapatan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Total pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 10,75% dibandingkan tahun 2019. Penurunan pendapatan terbesar terjadi pada PAD yang turun sebanyak 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas PAD Pemkot Batu berasal dari pajak daerah, akibat adanya penurunan perolehan pajak daerah maka akan mempengaruhi PAD tersebut. Pendapatan transfer tahun 2020 juga mengalami penurunan cukup besar yaitu sebanyak 6,94% dibandingkan tahun 2019, terutama akibat berkurangnya pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sementara lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan sebanyak 28,06% karena adanya hibah yang diberikan kepada Pemkot Batu.

Tabel 5 : Rasio Pertumbuhan Belanja Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020	Persentase
Belanja Operasi	Rp 699.813.215.331,25	Rp 720.958.198.578,64	3,02%
Belanja Modal	Rp 143.072.144.864,74	Rp 94.063.915.966,61	-34,25%
Belanja Tak Terduga	Rp 1.408.002.698,00	Rp 28.631.441.868,21	1933,48%
Total Belanja Daerah	Rp 844.293.362.893,99	Rp 843.653.556.413,46	-0,08%

Sumber. Data diolah (2021)

Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi penurunan untuk total belanja yang digunakan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Perubahan komposisi penggunaan belanja juga dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut. Belanja modal mengalami penurunan sebanyak 34,25% akibat adanya penghematan belanja modal. Sementara belanja operasi mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebanyak 3,02% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Tak terduga juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 1933,48% di tahun 2020. Belanja tersebut digunakan oleh Pemkot Batu sebagai sumber pendanaan penanggulangan pandemi Covid-19.

Kota Batu sebagai kota pariwisata memperoleh mayoritas pendapatannya melalui penerimaan pajak dan retribusi yang berasal dari usaha-usaha yang berhubungan dengan pariwisata. PSBB di awal pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak usaha-usaha di Kota Batu seperti tempat rekreasi, hotel dan rumah makan harus tutup sementara. Berkurangnya pengunjung menjadikan perolehan pendapatan usaha-usaha tersebut juga berkurang dan mempengaruhi usaha-usaha lain yang berhubungan dengan industri pariwisata seperti transportasi dan retail.

Fokus utama Pemkot Batu pada tahun 2020 adalah menanggulangi kasus pasien Covid-19 yang terus meningkat terutama saat libur hari raya dan tahun baru. Penduduk di kota Batu memiliki hak dan kewajiban selama pemberlakuan PSBB sesuai dengan Perwali No. 48/2020, yaitu dalam pemberian pelayanan kesehatan dan mematuhi pelaksanaan PSBB. Bantuan tunai dan pangan juga diberikan kepada mereka yang terdampak pandemi. Insentif pajak juga diberlakukan kepada pelaku usaha berupa pengurangan hingga pembebasan pajak dan retribusi. Upaya-upaya penanggulangan

tersebut memerlukan pendanaan yang diambil dari APBD baik pusat maupun daerah, termasuk APBD Pemkot Batu.

Analisis Kemandirian

Tabel 6 : Rasio Kemandirian Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	Rp 183.717.261.619,50	Rp 136.766.373.974,97
Pendapatan Transfer	Rp 786.961.111.369,00	Rp 732.316.780.356,00
Persentase	23,35%	18,68%

Sumber. Data diolah (2021)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemandirian di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 persentase kemandirian Pemkot Batu adalah sebesar 23,35%, sementara di tahun 2020 turun menjadi 18,68%. Peran pemerintah pusat dan provinsi masih mendominasi dalam membangun Kota Batu baik sebelum maupun saat terjadi pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian Pemkot Batu secara finansial masih belum signifikan. Selain itu penurunan rasio diakibatkan karena ada penurunan pada jumlah PAD dan pendapatan yang disesuaikan.

Penurunan ekonomi yang terjadi di masyarakat akibat adanya pembatasan kegiatan mempengaruhi pos PAD menjadi tidak maksimal. Sumber PAD berasal dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya. Mayoritas pendapatan tersebut berasal dari pungutan kepada masyarakat, sehingga jika ekonomi masyarakat menjadi lesu maka perolehan PAD juga akan turun. Pendapatan transfer mayoritas berasal dari pemerintah pusat. Fokus pemerintah baik pusat maupun daerah adalah menangani pandemi Covid-19. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi sehingga membuat pemda, termasuk Pemkot Baru, harus menyesuaikan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat dengan ikut berfokus pada penanganan pandemi.

Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk melihat pencapaian pemda dalam merealisasikan target yang sudah dianggarkan. Perhitungannya dengan membandingkan antara realisasi dengan anggarannya. Berikut tabel nilai rasio efektivitas pada Pemkot Batu.

Tabel 7 : Rasio Efektivitas Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020
Pendapatan Daerah	Rp 989.384.252.988,50	Rp 893.038.839.330,97
Anggaran Pendapatan Daerah	Rp 992.847.493.756,00	Rp 844.848.618.845,00
Persentase	99,65%	105,70%
Kinerja Keuangan	Cukup Efektif	Sangat Efektif
Pendapatan Asli Daerah	Rp 183.717.261.619,50	Rp 136.766.373.974,97
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 160.164.142.536,00	Rp 114.716.707.009,67
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 4.747.689.000,00	Rp 4.635.912.900,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 3.172.737.257,01	Rp 3.072.397.802,20
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 15.632.692.826,49	Rp 14.341.356.263,10
Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rp 160.391.145.019,00	Rp 110.947.791.067,00
Persentase	114,54%	123,27%
Kinerja Keuangan	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Pendapatan Transfer	Rp 786.961.111.369,00	Rp 732.316.780.356,00
Anggaran Pendapatan Transfer	Rp 817.946.348.737,00	Rp 702.217.757.778,00
Persentase	96,21%	104,29%
Kinerja Keuangan	Cukup Efektif	Sangat Efektif
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 18.705.880.000,00	Rp 23.955.685.000,00
Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 14.510.000.000,00	Rp 31.683.070.000,00
Persentase	128,92%	75,61%
Kinerja Keuangan	Sangat Efektif	Kurang Efektif

Sumber. Data diolah (2021)

Tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan untuk keseluruhan pendapatan daerah mengalami kenaikan efektivitas dari 99,65% dalam kategori cukup efektif menjadi 105,7% dengan sangat efektif. Keseluruhan pendapatan daerah telah berhasil mencapai target yang direncanakan, tetapi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan adanya variasi efektivitas kinerja keuangan di tahun 2019 dan 2020.

PAD di tahun 2019 dan 2020 dikatakan sangat efektif karena realisasi PAD lebih besar dari anggarannya. Besar persentase rasio efektivitas PAD di tahun 2019 adalah 114,54% dan naik menjadi 123,27% di tahun 2020. Kontribusi PAD terbanyak berasal dari pendapatan pajak daerah. Nilai pajak daerah di tahun 2020 adalah sebesar Rp 114.716.707.009,67 dari total perolehan PAD sebanyak Rp 136.766.373.974,97. Walaupun secara persentase mengalami kenaikan, tetapi secara nilai mengalami penurunan, baik pada realisasi maupun anggaran. Kenaikan pada persentase tersebut disebabkan adanya penyesuaian pada anggaran PAD yang dilakukan di tahun 2020 akibat adanya pembatasan kegiatan sosial dan fokus penanganan pandemi Covid-19.

Rasio efektivitas pendapatan transfer mengalami perbaikan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Persentasenya mengalami perbaikan dari 96,21% menjadi 104,29%. Pendapatan transfer tersebut berasal

dari transfer pusat, transfer pusat lainnya, transfer daerah lainnya dan bantuan keuangan. Walaupun secara kinerja menjadi lebih baik, tetapi secara nominal ada penurunan realisasi anggaran dari Rp 786.961.111.369,00 menjadi Rp 732.316.780.356,00. Pendapatan transfer pada Pemkot Batu paling banyak berasal dari transfer pusat diikuti transfer daerah. Mengingat penanganan Covid-19 tidak hanya menjadi permasalahan daerah tetapi permasalahan nasional, oleh karena itu pemerintah pusat maupun provinsi harus menyesuaikan kembali pendanaan transfer yang diberikan kepada daerah yang berada di bawah naungannya.

Rasio efektivitas lain-lain pendapatan daerah yang sah secara persentase mengalami penurunan dari yang semula 128,92% di tahun 2019 dengan kategori sangat efektif menjadi 75,61% di tahun 2020 dalam kategori kurang efektif. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diterima oleh Pemkab Batu melalui pendapatan hibah, walaupun secara persentase mengalami penurunan, tetapi secara nominal mengalami kenaikan dari Rp 18.705.880.000,00 menjadi Rp 23.955.685.000,00. Penurunan persentase tersebut diakibatkan karena adanya kenaikan pada nilai anggaran tetapi nilai realisasi yang diperoleh belum efektif dengan anggaran yang direncanakan.

Analisis Efisiensi

Tabel 8 : Rasio Efisiensi Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020
Pendapatan Daerah	Rp 989.384.252.988,50	Rp 893.038.839.330,97
Belanja Daerah	Rp 844.293.362.893,99	Rp 843.653.556.413,46
Persentase	85,34%	94,47%
Kinerja Keuangan	Efisien	Efisien

Sumber. Data diolah (2021)

Tabel 8 menunjukkan tingkat efisiensi yang perolehan pendapatan daerah dilihat dari pengeluaran belanja daerahnya. Kinerja keuangan tahun 2019 dan 2020 dikatakan efisien dengan persentase masing-masing 85,34% dan 94,47%, semakin rendah nilai rasionya semakin baik efisiensi kinerja keuangannya. Kenaikan persentase tersebut disebabkan karena berkurangnya pendapatan daerah yang diterima oleh Pemkot Batu dari Rp 989.384.252.988,50 menjadi Rp 893.038.839.330,97 dengan jumlah penurunan nominal belanja daerah yang tergolong stabil.

Analisis Keserasian

Rasio keserasian digunakan untuk melihat keharmonisan antar belanja seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi merupakan belanja jangka pendek yang sifatnya rutin karena hanya digunakan pada satu periode anggaran. Belanja modal memiliki sifat yang cenderung tidak rutin tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang karena kecenderungannya dalam membeli aset. Sementara belanja tak terduga merupakan belanja yang tidak diharapkan pengeluaran karena sifatnya yang tidak biasa.

Tabel 9 : Rasio Kecerasingan Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	Persentase	2020	Persentase
Belanja Operasi	Rp 699.813.215.331,25	82,89%	Rp 720.958.198.578,64	85,46%
Belanja Modal	Rp 143.072.144.864,74	16,95%	Rp 94.063.915.966,61	11,15%
Belanja Tak Terduga	Rp 1.408.002.698,00	0,17%	Rp 28.631.441.868,21	3,39%
Total Belanja Daerah	Rp 844.293.362.893,99	100,00%	Rp 843.653.556.413,46	100,00%

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 9 menunjukkan tingkat keserasian pada belanja yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu pada tahun 2019 dan 2020. Komposisi belanja daerah pada Pemkot Batu terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Rasio keserasian belanja masih didominasi oleh belanja operasi baik di tahun 2019 maupun 2020. Belanja operasi di tahun 2019 memiliki rasio keserasian sebesar 82,89%, kemudian naik di tahun 2020 menjadi 85,46%. Kenaikan tersebut juga diikuti oleh kenaikan jumlah belanja yang dikeluarkan yaitu dari Rp 699.813.215.331,25 menjadi Rp 720.958.198.578,64.

Rasio keserasian pada belanja modal justru mengalami penurunan, yang awalnya 16,95% dari keseluruhan belanja menjadi 11,15% di tahun 2020. Sementara belanja tak terduga mengalami kenaikan rasio keserasian dari yang awalnya 0,17% menjadi 3,39% di tahun 2020. Penghematan yang dilakukan pada belanja modal serta kenaikan komposisi pada belanja operasi dan belanja tak terduga merupakan bentuk keseriusan Pemkot Batu dalam menangani pandemi Covid-19.

Analisis Ekonomi

Tabel 10. Rasio Ekonomi Pemkot Batu 2019 dan 2020

Keterangan	2019	2020
Belanja Daerah	Rp 844.293.362.893,99	Rp 843.653.556.413,46
Anggaran Belanja Daerah	Rp 1.157.770.809.579,26	Rp 1.064.291.347.596,77
Persentase	72,92%	79,27%
Kinerja Keuangan	Ekonomis	Ekonomis
Belanja Operasi	Rp 699.813.215.331,25	Rp 720.958.198.578,64
Belanja Pegawai	Rp 371.339.773.614,00	Rp 382.506.940.511,40
Belanja Barang dan Jasa	Rp 259.949.632.008,01	Rp 253.499.302.031,67
Belanja Hibah	Rp 54.480.138.723,24	Rp 63.036.851.701,57
Belanja Bantuan Sosial	Rp 14.043.670.986,00	Rp 21.915.104.334,00
Anggaran Belanja Operasi	Rp 854.269.728.609,56	Rp 839.208.496.937,67
Persentase	81,92%	85,91%
Kinerja Keuangan	Ekonomis	Ekonomis
Belanja Modal	Rp 143.072.144.864,74	Rp 94.063.915.966,61
Anggaran Belanja Modal	Rp 201.158.248.582,10	Rp 128.560.033.185,05
Persentase	71,12%	73,17%
Kinerja Keuangan	Ekonomis	Ekonomis
Belanja Tak Terduga	Rp 1.408.002.698,00	Rp 28.631.441.868,21
Anggaran Belanja Tak Terduga	Rp 102.342.832.387,60	Rp 96.522.817.474,05
Persentase	1,38%	29,66%
Kinerja Keuangan	Ekonomis	Ekonomis

Sumber. Data diolah (2021)

Tabel 10 menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah Pemkot Batu dapat dikatakan ekonomis untuk tahun 2019 dengan persentase 72,92% dan 79,27% di tahun 2020. Komponen belanja daerah seperti belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga baik di tahun 2019 dan 2020 masih dikatakan ekonomis. Belanja operasi yang berhasil diserap di tahun 2019 sebesar 81,92% dan 85,19% di tahun 2020. Belanja modal di tahun 2019 berhasil menyerap sebanyak 71,12%, sedangkan tahun 2020 berhasil menyerap 73,17%. Kenaikan penyerapan belanja daerah secara signifikan dapat dilihat pada belanja tak terduga yang awalnya 1,38% menjadi 29,66%. Hal tersebut merupakan bukti bahwa adanya pengeluaran pada belanja tak terduga yang lebih besar di tahun 2019 dibandingkan tahun 2020.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemkot Batu untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan pendapatan Pemkot Batu pada 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja di tahun 2020 mengalami penghematan dibanding tahun sebelumnya.
- 2) Tingkat kemandirian Pemkot Batu secara finansial baik di tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh peran pemerintah pusat.
- 3) Tingkat efektivitas kinerja pendapatan daerah mengalami kenaikan dari yang semula cukup efektif di tahun 2019 menjadi sangat efektif di tahun 2020. Pemkot Batu juga berhasil mempertahankan predikat sangat efektif untuk kinerja PAD-nya. Sementara untuk pendapatan transfer juga mengalami kenaikan kinerja yang sebelumnya cukup efektif menjadi sangat efektif di tahun 2020. Akan tetapi untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan kinerja yang semula sangat efektif menjadi kurang efektif.
- 4) Tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 berada dikategori efisien walaupun terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan
- 5) Tingkat keserasian belanja baik di tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh belanja operasi, walaupun terjadi penurunan pada belanja modal. Sementara untuk belanja tak terduga terjadi kenaikan yang sangat signifikan.
- 6) Tingkat ekonomis di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan ekonomis baik untuk belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Penelitian dengan melihat kinerja keuangan pemerintah selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk akuntabilitas publik masih perlu dilakukan, tidak hanya secara jangka pendek tetapi juga jangka panjang, mengingat pandemi telah berjalan lebih dari satu periode serta efeknya yang berbeda pada masing-masing pemda. Penelitian secara kualitatif untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda dalam mempertahankan PAD juga dapat dilakukan karena setiap daerah memiliki hak otonomi daerah untuk mengatur keuangan pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kawatu, Freddy Samuel. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mahsun, Mohamad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
- Pandelaki, J. R., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 14-34. <https://doi.org/10.35794/jpekd.34592.22.2.2021>

- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Pemerintah Daerah Kota Batu. (2020). Peraturan WaliKota Batu No. 48 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona virus Disease* 2019.
- Pemerintah Indonesia. (2010) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Syafnita, S. (2021). Menelisik Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 75-87. <http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v24i1.1391>
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1), 61-74.